

PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI)

DALAM GEJOLAK REVOLUSI FISIK DI INDONESIA

EMERGENCY GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (PDRI) IN THE PHYSICAL REVOLUTION IN INDONESIA

Dewa Made Alit¹, Nyoman Bayu Prammartha², Thomas Yovan Darman³, Ni Luh Wika
Kristina⁴

^{1,2,3,4} Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

*Pos-el: dewaalit@mahadewa.ac.id bayuprammartha@gmail.com
wikakristina1005@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan peranan PDRI dalam kancah revolusi Indonesia tahun 1948-1949. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif historis atau metode sejarah kritis yang dimulai dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, analisa hingga sintesa. Sumber data yang digunakan semuanya digali dari berbagai perpustakaan baik yang berupa literatur maupun arsip-arsip. Penelitian ini penting mengingat ketika Sukarno-Hatta ditawan oleh Belanda lewat agresi meliternya, pihak Belanda menganggap Republik yang baru berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1945 tidak mungkin dapat bertahan dan kolonialisme yang sudah lama menghisap bumi Indonesia akan tetap bertahan. Dengan lahirnya PDRI baik dalam teritori maupun praktik membuktikan bahwa asumsi Belanda salah besar. Di bawah Syafruddin Prawiranegara, PDRI ternyata mampu mempertahankan eksistensi RI baik secara de facto maupun de jure. Sekalipun masa kekuasaan PDRI hanya enam setengah bulan, waktu yang relatif pendek, sumbangannya kepada revolusi Indonesia cukup besar. Perjalanan sejarah PDRI juga menunjukkan bahwa keberhasilan PDRI menjalankan mandatnya sangat dipengaruhi oleh system pemerintahan yang diterapkan yakni dengan menjalin hubungan yang harmonis antar berbagai kekuatan bangsa terutama hubungan sipil-meliter. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kehadiran PDRI dalam revolusi Indonesia memang telah dipersiapkan oleh pemerintah Republik yakni dengan dikirimnya kawat kepada Syafruddin Prawiranegara yang isinya agar mendirikan pemerintahan darurat bila pemerintah pusat tidak dapat menjalankan tugasnya. Perintah lisan juga datang dari wakil presiden Hatta walaupun disampaikan secara samar.

Kata Kunci: PDRI, Revolusi Fisik

Abstract. This study aims to determine the background and role of the PDRI in the Indonesian revolution in 1948-1949. This study uses historical qualitative methods or historical critical methods starting from heuristics, source criticism, interpretation, analysis to synthesis. The data sources used were all extracted from various libraries, both in the form of literature and archives. This research is important considering that when Sukarno-Hatta was taken prisoner by the Dutch through their military aggression, the Dutch considered that the Republic which had only been established since August 17, 1945 was impossible to survive and colonialism which had long sucked Indonesian soil would still survive. The birth of the PDRI, both in terms of territory and practice, proved that the Dutch assumption was wrong. Under Syafruddin Prawiranegara, PDRI was able to maintain the existence of the Republic of Indonesia both de facto and de jure. Even though the PDRI was in power for only six and a half months, a relatively short period of time, its contribution to the Indonesian revolution was quite large. PDRI's historical journey also shows that PDRI's success in carrying out its mandate was

greatly influenced by the system of government that was implemented, namely by establishing harmonious relations between various national forces, especially civil-military relations. This research also shows that the presence of the PDRI in the Indonesian revolution had indeed been prepared by the government of the Republic, namely by sending a wire to Syafruddin Prawiranegara to establish an emergency government if the central government was unable to carry out its duties. Oral orders also came from vice president Hatta, although they were conveyed in a vague way.

Keywords: PDRI, Physical Revolution

PENDAHULUAN

Perjuangan tiada kata akhir. Demikian perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme Belanda di Indonesia Selama berabad-abad (Alit, D. M. 2015). Salah satu tonggak bersejarah perjuangan Bangsa Indonesia adalah pemindahan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi dalam rangka mengantisipasi agresi militer Belanda yang ke 2 yang dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ada berbagai masalah yang amat penting yang berkaitan dengan PDRI yang perlu diungkapkan salah satunya adalah PDRI yang berpusat di Bukittinggi, sebuah peristiwa lokal yang berdampak nasional bahkan internasional.

Hadirnya PDRI Desember tahun 1948 telah menyelamatkan Negara Indonesia, sehingga segala provokasi Belanda ditolak oleh dunia internasional. Tidak berlebihan bila dikatakan bahawa PDRI di Bukit tinggi merupakan pintu gerbang bagi keberhasilan perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun

patut disayangkan bahwa harga, nilai dan sumbangan PDRI tersebut kurang dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Ini merupakan tantangan bagi kalangan sejarawan Indonesia demi kelurusan sejarah perjuangan bangsa yang benar dan *ein malig*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan kepustakaan sebagai tempat penggalain semua informasi yang diperlukan baik berupa dokumen maupun literature-literatur. Dokumen yang dimaksud di sini tidak terbatas pengertiannya pada sekumpulan data data verbal yang berbentuk tulisan tetapi meliputi foto, monument dan lain-lain (Kartodirjo, 1982:98).

Teknik analisis sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan metode sejarah kritis atau kualitatif historis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian sejarah terdapat dua unsure dasar yang sangat penting yaitu banyak

sedikitnya kumpulan bahan-bahan yang terpercaya dan penerapan metode kritis (Nevins, 1962:66). Dengan metode ini akan diperoleh data-data yang berbobot dan autentik.

Didalam pengujian atau analisis sumber dilakukan kritik baik kritik ekstern maupun kritik intern. Melalui kedua kritik ini diperoleh data-data yang kredibel dan autentik. Menurut Sartono Kartodirjo, kedua kritik itu termasuk teknik pengumpulan dan penyeleksian data (1982:98).

Pada umumnya, sejarah analitis hendak menguraikan kausalitas, factor-faktor kondisional serta determinan-determinan dari peristiwa sejarah. Implikasi metodologis dari penyusunan sejarah analitis adalah konsep-konsep, hipotesa dan teori-teori yang digunakan sebagai prinsip penyeleksian dan pengintegrasian yang harus dirumuskan secara eksplisit, sehingga lebih terbuka untuk penilaian secara obyektif (Kartodirjo, 1982:70). Pada tahap terakhir ini dilakukan penyusunan data atau sintesis berdasarkan bukti-bukti yang ada guna menegakan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Penyajian Hasil Penelitian

A. Latar Belakang Lahirnya PDRI

1. Strategi Politik Menghadai Agresi

Meliter Belanda

Pada babakan terakhir dari dekolonialisasi dari bangsa Belanda terdapat suatu periode singkat tetapi menentukan sekali bagi kelangsungan hidup bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia yaitu periode perang kemerdekaan II (1948-1949). Setelah Perdana menteri Mr. Amir Syarifuddin menandatangani perjanjian renville 17 Januari 1948, banyak pihak yang mengganggu Amir Syarifuddinterlalu memberikan konsesi politik kepada Belanda. Kecaman dari berbagai pihak muncul membuat Amir Syarifuddin mengembalikan kekuasaannya kepada Sukarno.

Presiden Sukarno menunjuk Mohammad Hatta sebagai formatur cabinet. ini berarti usaha mengembalikan kepada pembentukan cabinet presidensial sesuai amanat UUD 1945. Kabinet Hatta diumumkan pada tanggal 29 Januari 1948, dengan Moh. Hatta sebagai Perdana Mewntri merangkap menteri pertahanan. Pengangkatan Hatta sebagai perdana menteri dengan pertimbangan cabinet Hatta akan sangat berwibawa dan perundingan diharapkan akan berjalan dengan lancar. Kewibawaan cabinet terutama dilihat dari latar belakang Hatta, yakni salah seorang proklamator kemerdekaan RI dan tokoh

pergerakan nasional yang reputasinya sangat menonjol di kalangan politisi. Agaknya sisi lain tidak dipentingkan, realitasnya Hatta seorang nasionalis yang sangat prinsipil yang susah diajak kompromi bila itu menyangkut kepentingan nasional (Agung, 1983:79). Keteguhan Hatta terlihat dalam perundingan dengan delegasi Belanda. Ia menolak hasil perundingan yang telah disepakati oleh Amir Syarifuddin pada waktu sebelumnya yaitu bahwa status RI sederajat dengan Negara bagian lainnya. Karena apabila status itu diterima berarti hak kedaulatan yang dimiliki sejak 17 Agustus 1945 akan hilang. Lagi pula hubungan dengan luar negeri harus diputus, dinas diplomatiknyapun harus dihapus dan TNI harus dibubarkan. Maka pihak republik sama sekali tidak berniat memenuhi tuntutan Belanda itu. Perbedaan mendasar dalam pandangan tentang kedudukan RI itulah yang menyebabkan kegagalan dan kemacetan perundingan, baik yang dilaksanakan di Jakarta ataupun di Yogyakarta.

Prakarsa-prakarsa KTN (Komisi Tiga Negara) selaku perantara tidak pernah diperhatikan pihak Belanda. Pemerintah Belanda memandang pemecahan masalah lewat jalan politik tidak mungkin lagi, maka Perdana Menteri Dr. Beel memperhitungkan kemungkinan tindakan militer sebagai

penggantinya. Dibanding dengan Jawa, kondisi politik di Sumatra relative lebih stabil dimana Sumatra setia berada dibelakang Republik. Kepemimpinan Sukarno-Hatta menjadi idola rakyat Sumatra, sehingga dengan turuntangannya kedua tokoh ini berbagai perselisihan dapat diatasi. Suasana seperti ini dapat dilihat dari laporan J.J. Van de Velde (1987:126) seorang penasehat politik pemerintah untuk Sumatra, yang disampaikan kepada pemerintah Kerajaan Belanda bulan Juni 1948. Penangan masalah-masalah di Sumatra juga berhasil baik berkat wibawa wakil Preside Hatta khususnya mengenai pertentangan ditubuh ketentaraan.

Sementara itu suhu politik sudah berada pada lingkaran pinggir yang paling panas. Perundingan Indonesia – Belanda tanggal 30 Nopember 1948 belum dapat mendamaikan perbedaan politik kedua belah pihak. Upaya terakhir Moh. Hatta agar perundingan dapat diadakan lagi adalah dengan mengirim surat kepada Merle Cochran, anggota KTN dari Amerika Serikat, tanggal 13 Desember 1948. Dengan tidak sengaja surat itu benar-benar memojokkan pihak Belanda, karena saat itu telah ada perintah untuk melancarkan aksi militer. Maka Belanda terpaksa menundanya dan memberikan jawaban empat hari kemusian melalui Cochran di Kaliurang, Yogyakarta. Nota jawaban

dinilai KTN tidak memberikan andangan baru untuk melanjutkan perundingan dan sifatnya mengultimatum. Cochran sangat tidak setuju dan mengkritik pihak Belanda tidak memiliki tanggungjawab, menekan Hatta dan menjadi sebab pokok pecahnya perang.

2. Strategi Meliter menghadapi Agresi

Belanda

Sejak awal tahun 1948, para pimpinan meliter sudah mulai memikirkan masalah strategi guna menghadapi kemungkinan Belanda menyerang lagi. Persoalan penyusunan strategi meliter dipercayakan kepada Kolonel A.H. Nasution selaku kepala Staf Operasi MBAP (Markas Besar Angkatan Perang). Maka atas perintah Panglima Besar Jendral Sudirman, Kolonel A.H. Nasution mengajukan konsepsi tentang susunan pertahanan dan ketentaraan. Konsepsi tersebut digali dari pengalaman-pengalaman selama perang kemerdekaan I tahun 1947. Ada dua ahal pokok yakni perlunya organisasi territorial kantong-kantong yang bersendikan masyarakat desa dan pembagian pasukan menjadi dua kelompok besar dengan tugas loka-defensif dan mobil-ofensif.

Langkah pokok yang diambil oleh Kolonel A.H. Nasution untuk pedoman

pasukan adalah: tidak akan melakukan pertahanan linier, menghambat gerakan musuh, pengungsian total dan bumi hangus secara total, membentuk kantong-kantong di tiap-tiap onderdistrik melitert yang mempunyai pemerintahan gerilya yang totaliter dan mempunyai pusat di beberapa komplek pegunungan, pasukan-pasukan yang berasal dari daerah federal berWingate (menyusup kembali ke daerah asal) dan membentuk kantong-kantong. Adapun tujuan yang tersirat dalam siasat tersebut adalah membuat Belanda semakin tidak aman, dan TNI mampu melakukan trobosan-trobosan ke daerah-daerah. Pada akhirnya akan terwujud pertahanan rakyat total yang sulit dihancurkan musuh.

Agresi meliter Belanda II praktis membuat aktivitas terbang di atas Jawa dan Sumatra terhenti. Walaupun sebenarnya jauh sebelumnya sudah dipersiapkan segala keperluan perhubungan udara dari soal suplay bahan bakar, lapangan udara hingga pembelian pesawat terbang. Namun kenyataan situasi cukup gawat untuk penerbangan sehingga semua persiapan hanya sedikit manfaatnya untuk menunjang kegiatan penerbangan. Sebagian besar persiapan tersebut berguna dan besar peranannya pada masa sebelum agresi meliter Belanda II. Adapun kesibukan strategis yang terjadi di luar negeri seperti Birma dan India merupakan suatu

kesuksesan besar bagi AURI. Di Birma hubungan udara sudah dipersiapkan oleh Wiweko, Sugandi dan Sumarno. Mayor Wiweko telah dapat bekerja sama dengan Markas Besar tentara Birma yang sanggup memberikan bantuan penuh kepada RI (Nasution, 1989:124). Selain itu pihak militer Yogyakarta telah menyiapkan tempat pengungsian untuk kepala Negara jika keadaan darurat memerlukan cara demikian. KSAU menyiapkan landasan gading untuk penerbangan, sedangkan Komando militer Kota (KMK) menyiapkan satu pos darurat di Kraton Mataram untuk dipergunakan oleh presiden. Dari tempat itu kemudian pimpinan Negara akan dialihkan ke Samigaluh sebagai pos pertama di luar kota Yogyakarta (Nasution, 1989:95). Oleh karena perhubungan udara tertutup bagi AURI maka prajurit-prajurit udara langsung mentransformasikan dirinya sebagai prajurit darat. Mereka berperan penting dalam bidang perhubungan radio. Peranan radio sangat besar dalam revolusi sehingga wajarlah jika selalu dikontrol persiapannya oleh pemimpin perjuangan. Sebagai contoh pentingnya radio dapat disimak dalam dialog singkat antara menteri kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara dengan Komodor Udara H. Soejono berikut: “Lho dimana zendernya sdr. Soejono. Kok saya tidak melihat, katanya ikut kita. Oh ya ada. Zendernya k.l

½ KM dari sini dalam pengawasan saya untuk siap pakai dan siap sembunyi. Memang itu dengan resmi saya perbantukan kepada Pemerintah dan langsung siap pakai bagi Bapak” (Sopejono, 1989:8). Dialog ini terjadi tatkala Bukittinggi dijatuhi Bom oleh pesawat terbang Belanda.

2. PDRI dalam Revolusi Indonesia

1. Kedudukan PDRI dalam revolusi Indonesia

Kehadiran PDRI disaat bangsa dan Negara dalam keadaan kritis akibat agresi militer Belanda II mempunyai arti penting bagi kelangsungan hidup RI. Sekalipun gerilyawan TNI sanggup berperang dalam waktu bertahun-tahun lamanya seperti diyakini oleh Moh. Hatta tetapi apa yang akan terjadi andaikata PDRI tidak muncul di tengah-tengah revolusi Indonesia. Bagi Taufik Abdullah, tanpa PDRI yang ada hanyalah gerombolan-gerombolan gerilyawan (Risalah, 1988, No. 8 Th. XXV:11). Dengan adanya PDRI maka wakil-wakil RI tetap diakui oleh dunia internasional, karena itu diplomasi di forum PBB berjalan terus. Tanpa diplomasi para pejuang bersenjata tidak akan menang dan sebaliknya para diplomat pun tidak akan mendapat suara yang meyakinkan tanpa dukungan gerilyawan (Wild, 1986:150).

Dalam berbagai forum internasional, yang paling merngesankan bagi pemerintah-pemerintah di luar negeri adalah adanya gagasan untuk mendirikan pemerintah darurat sebagaisambungan atau pengganti pemerintah Republik. Karena itu yang menarik perhatian adalah bahwa kedua unsure pemerintah Indonesia baik yang diwakili oleh Sukarno-Hatta maupun yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara sama-sama menyebut Republik sebagai satuan bangsa-bangsa yang harus dipertahankan. Apakah ini suatu hal yang kebetulan aataukah senagaja dirumuskan untuk menghindari adanya dualism antara pemerintah yang ditawan dengan pemerintah yang bergrihya (di Sumatra).

Adapun gagasan pembentukan PDRI secara gambling dapat disimak dari pengalaman Mr. Syafruddin Prawiranegara yang disampaikan dalam Risalah (1988, No. 8 Th. XXVV:13) sebagai berikut:

“Gagasan ini memang sengaja kami lontarkan dan kebetulan rapat menyetujinya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyelamatkan Republik ini dari terulangnya penjajahan. Kami tahu bahwa penggempuran Yogya dan Bukittinggi serta penangkapan terhadap beberapa pucuk pimpinan Negara adalah dalam rangka menghapus eksistensi RI. Karena negeri kita telah mempunyai teritorial dan rakyat,

maka esensi pemerintah kami pertahankan dan wujudkan sekalipun bersifat darurat dan mobil, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat selanjutnya”.

Dari pernyataan Syafruddin ini tampak dengan sengaja pendiri PDRI memakai kata Republik karena Belanda ingin menghapus RI, sementara mereka ingin menyelamatkan republic. Selain itu para pendiri PDRI mengetahui persyaratan yang diperlukan bagi suatu pemerintahan. Maka urgensi PDRI adalah fungsinya sebagai salah satu unsure hokum internasional yang mensyaratkan adanya pemerintahan yang mewakili Negara dan bangsanya. Maka pembentukan PDRI semata-mata berdasarkan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perjuangan agar jangan sampai terjadi kekosongan dalam pemerintahan yang memang dikendaki oleh Belanda.

Ditinjau dari sudut hokum ketatanegaraan, kedudukan PDRI memiliki landasan hokum yang kuat. Ia merupakan pemerintahan peralihan yang sah. Dasar pembentukannya adalah mandate Presiden Sukarno dan Wakil Presiden / Perdana Mentri Moh. Hatta. Ada dua kawat yang ditujukan kepada MR. Syafruddin Prawiranegara dan Mr. AA Maramis di New Delhi. Kawat pertama berbunyi sebagai berikut:

“Kami presiden republic Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 desember jam 6.00 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasai kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, menteri kemakmuran republic Indonesia, untuk membenruk Pemerintahan Republik Indonesia darurat di Sumatra”.

Sedangkan bunyi kawat yang ditujukan kepada Mr. AA Maramis di New Delhi India sebagai berikut:

“Kami presiden republic Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 desember jam 6.00 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta. Jika ikhtiar Mr. Syafruddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat di Sumatra tidak berhasil, kepada saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di New Delhi. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatra. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya”.

Satu hal yang perlu dicatat dalam lembaran sejarah Indonesia ketika terjadi pembentukan PDRI itu, para pembentuknya sendiri belum tahu kalau telah mendapatkan

mandat dari pemerintah RI. Meski Sukarno-Hatta telah mengirimkan mandate namun karena jalur-jalur komunikasi telah dipotong dan dikuasai oleh Belanda maka mandate tersebut tidak pernah sampai ke tangan yang harus menerimanya. Naskah berita penyerangan dan penyerahan tanggungjawab pemerintahan itu dibawa oleh AR. Baswedan ke studio radio Secodiningraten Yogyakarta, demikian pengakuannya (dalam Atmakusumah, 1982:224). Tidak sampainya mandate ke tangan Syafruddin Prawiranegara tampaknya bukan persoalan, karena sejak dikeluarkannya mandate tersebut berarti kekuasaan Negara sudah bergeser dari tangan Sukarno-Hatta ke tangan Syafruddin Prawiranegara. Formalitas dan legalitasnya sudah beralih dank arena itu perwakilannya-perwakilannya di luar negeri diakui sebagai perutusan yang sah dari republic oleh dunia internasional.

Sebagaimana diketahui dari kawat yang ditujukan kepada Syafruddin Prawiranegara, apabila dikaji lebih teliti tersimpul keadaan de facto mengukuhkan pernyataan de jure setelah Sukarno-Hatta diketahui sebagai tawanan. Kawat kedua lebih kondisional lagi dimana AA Maramis tidak bisa membentuk Exile government RI di New Delhi India sebelum menghubungi Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatra, inipun kalau Syafruddin Prawiranegara

gagal membentuk PDRI. PDRI memang unik dan pembentukannya memang merupakan keanehan dalam sejarah. Dikatakan unik karena hanya sekali terjadi sedangkan keanehannya karena mandate dari pemerintah RI baru diketahui oleh para pendiri PDRI pada waktu belakangan. Tetapi mereka memiliki gagasan yang serupa dengan isi kawat sehingga tanpa konsultasi satu sama lain atas inisiatif sendiri membentuk PDRI (Reid, 1974:154). Bagi Kahin berpendapat Syafruddin Prawiranegara sengaja dikirim Hatta ke Bukittinggi untuk bersiap-siap menyelenggarakan pemerintahan darurat jika terjadi agresi militer Belanda II (1963:332) dan ternyata pendapat ini dibenarkan oleh Bung Hatta (1978:528). Maka pada kesempatan Kahin mengatakan bahwa yang menjadi pedoman satu-satunya bagi Syafruddin Prawiranegara membentuk PDRI adalah mandate samar-samar yang ditinggalkan Hatta kepadanya (Risalah, No. 9 Th. XXv, 1988:52).

Mohammad Hatta sendiri tampak begitu optimis akan terbentuknya pemerintahan darurat di Sumatra tatkala Yogyakarta dikepung oleh Belanda. Hal ini tercermin dalam Order Harian yang ia tujukan kepada semua angkatan perang dan semua instansi pemerintah seperti di bawah ini:

“Mungkin pemerintah Republik Indonesia di Yogya dikepung dan tidak dapat melakukan tugas kewajibannya, tetapi persiapan telah diadakan untuk meneruskan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatra. Apapun yang terjadi dengan orang-orang pemerintah yang ada di Yogya, perjuangan diteruskan” (Nasution, 1980:137).

Akan tetapi Order harian wakil Presiden itu tidak secepatnya sampai di tangan para pejabat sipil-militer. Mereka juga tidak mengetahui pengumuman-pengumuman pemerintah di Yogyakarta, sehingga mereka mengambil inisiatif untuk menghadapi serbuan Belanda. Menteri dalam negeri dr. Sukiman mendirikan pemerintahan darurat di Solo. Sementara itu Kolonel A.H. Nasution membentuk pemerintahan militer di Jawa (PKD).

2. PDRI Menggagalkan Tujuan Belanda

PDRI merupakan produk dari persiapan strategi dibidang politik untuk mengantisipasi kemungkinan agresi militer Belanda II. Kehadirannya sebagai jawaban atas teka teki dunia yang muncul setelah aksi itu meletus sekaligus untuk menunjukkan bahwa RI masih berdiri tegak. Lebih jauh kehadiran PDRI juga berarti TNI sebagai tentara Republik masih tetap terorganisasi dan terkoordinasi. Dikatakan

teka teki dunia karena dewasa itu dunia internasional mengira bahwa RI telah lenyap. Negara-negara yang bersimpati kepada RI pun, sudah benar-benar percaya pada pengumuman-pengumuman radio Belanda yang menyiarkan secara terus-menerus tentang eberakhirnya riwayat RI. Pemerintah Belanda secara resmi pada tanggal 3 januari 1949 tidak mengakui lagi kekuasaan de facto Republik sebagai republic, dengan pengertian republic sebagai suatu kesatuan ketatanegaraan dengan wilayah sendiri dinyatakan sudah tidak ada lagi. Pernyataan itu juga didengar oleh tokoh-tokoh politik yang ditawan di Bangka, dikemudian hari keterangan itu diketahui oleh pihak KJB (Komisi Jasa-jasa Baik).

Anggapan itu sebagai konsekwensi logis dari tindakan kekerasan Belanda yang cukup berhasil. Bahkan belanda juga melakukan ancaman-ancaman bagi masyarakat. Terror psikologis yang dilakukan oleh Belanda akan dapat mematahkan semangat perjuangan kaum republikan dan segala persoalan akan dapat diselesaikan dengan segera. Tetapi pendapat itu keliru sebab unsure-unsur dalam revolusi nasional yang merupakan kekuatan perjuangan sangat kompleks sehingga sulit dihancurkan. Belanda kurang menyadari bahwa revolusi Indonesia betul-betul timbul dari keyakinan dan

keinginan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemauan rakyat yang besar itu menyebabkan tumbuhnya kesadaran dan kesediaan kaum republikan untuk menggantikan pemimpin-pemimpin yang ditangkap atau meninggal. Maka terbentuknya PDRI yang kemudian menjalankan fungsinya sebagai pemerintah RI yang bersifat mobil, sebenarnya Belanda itu telah gagal mencapai tujuannya (Rosidi, 1986:122).

Secara politis kesulitan-kesulitan Belanda justru bertambah menumpuk, sebab agresi Belanda mengundang berbagai tekanan dan kritikan pedas dari Negara-negara Asia, Amerika Seerikat, Australia, dan Negara barat lainnya. Sanksi terhadap Belanda segera diberikan oleh Srilangka yakni berupa penutupan pelabuhan udara buat kapal terbang Belanda yang berkementingan dengan masalah RI. Tindakan ini diikuti oleh India dan Pakistan. Liga Arab di Kairo mengajukan imbauan kepada Dewan Keamanan PBB supaya belanda segera menghentikan agresinya dan menarik mundur pasukannya dari Negara RI. Pada tanggal 22 desember 1948 Amerika Serikat menghentikan bantuan ekonominya kepada Hindia Belanda. Kebanyakan Negara-negara anggota PBB marah dengan tindakan Belanda yang tidak mempedulikan reses mereka. Sehingga mereka terpaksa kembali

untuk mengadakan sidang sebagai pertanda tanggung jawabnya tidak dapat dikelabui oleh politik Belanda tersebut. Pada tanggal 28 Desember 1948 Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi keras yaitu: 1) agar pemimpin-pemimpin Republik dibebaskan dan dilaporkan tentang kondisi mereka dalam 24 jam, 2) agar segera cease-fire diawasi oleh tim konsuler PBB di Indonesia. Pihak belanda bersedia menghentikan aksi di Jawa (31 Desember 1948) dan lima hari kemudian di Sumatra.

Oleh karena resolusi tidak dijalankan oleh pihak Belanda maka hal itu dilaporkan kepada PBB oleh Komisi (KTN) yang melihat dari dekat perkembangan di Indonesia. Masalah konflik Indonesia-Belanda menjadi perhatian dunia internasional, di forum PBB terdengar protes-protes keras dari Negara-negara anggota kecuali Belgia dan Rusia. Di New delhi berkumpul saembilan belas utusan dari Negara-negara Asia yang menuntut kepada Dewan Keamanan supaya bertindak tegas terhadap pemerintah Belanda. Dikawatirkan wibawa PBB akan berkurang hanya karena laporan-laporan Belanda yang tidak realistis dan kontroprisial dengan laporan dari komisi.

Pada bulan Januari 1949 rupanya siaran radio PDRI sudah berhasil menembus sebagian besar pusat-pusat perjuangan di

Sumatra, Jawa dan luar negeri. Langkah penting yang diambil oleh PDRI ialah mengumumkan kepada dunia luar (Jawa dan laur negeri) bahwa pemerintah RI masih ada dan bersifat mobil. Pernyataan ini terus dikumandangkan dengan maksud untuk mengkaunter berita-berita radio Belanda yang dominan pada waktu itu. Tatkala pengumuman belanda tentang jatuhnya RI secara luas, hanya pidato yang berapi-api dari Syafruddin Prawiranegara disiarkan melalui radio dari Bukittinggi yang kedengaran (Wild, 1986:197). Sedangkan radio gerilya dan RRI di Sumatra dan jawa belum berfungsi secara baik.

Sementara itu pihak belanda sibuk membentuk pemerintahahn federal peralihan yang nantinya akan menjadi NIS (Negara Indonesia Serikat). Pemerintah interim itu hanya mungkin terbentuk dengan keterlibatan RI. Oleh karena itu, Belanda membujuk tokoh-tokoh politik Republik agar bersedia menjadi wakil RI. Tetapi tak seorangpun yang bersedia, baik mereka yang bersetatus tawanan sepereti Hatta, syahrir maupun yang bukan tawanan belanda seperti Prof. Supomo, Darmasetiawan, dan Sudjono. Sementara itu PDRI menyatakan pendiriannya memutus hubungan dengan Jakarta, Bangka dan Lake Succes (Nasution, 1989:193). PDRI tidak mau diajak

kompromi dan menyatakan hanya berhubungan dengan konferensi Asia. Sikap inilah yang membuat Belanda gagal menyusun Negara bagian RI. Ini membuktikan PDRI menggagalkan tujuan Belanda, sebaliknya pihak Belanda kesulitan menghancurkan gerakan-gerakan PDRI. Antara PDRI dan Belanda saling berperang melalui siaran radio. Pernah radio Belanda mengejek PDRI sebagai “Pemerintah dalam Rimba Indonesia”, maka Syafruddin Prawiranegara membalas:

“Kami meskipun dalam rimba, masih tetap di wilayah RI, karena itu kami pemerintah yang sah. Tetapi Belanda pada waktu negaranya diduduki Jerman pemerintahnya mengungsi ke Inggris. Padahal undang-undangnya sendiri menyatakan bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya. Apakah Inggris jadi wilayah kekuasaan Belanda? yang jelas pemerintah Belanda menjadi tidak sah” (Rosidi, 1986:121-122).

Melalui perpaduan dua bentuk perjuangan, yakni bidang politik dan militer, sebenarnya revolusi Indonesia sudah berada diambang pintu kemenangan. Kemenangan hanya tinggal menunggu waktu, sebab menyatukan seluruh potensi

yang ada pada RI selalu dihalang-halangi oleh lawan-lawan politik RI. Bukan saja pihak Belanda yang ingin menyelesaikan masalah Indonesia dengan tuntas, melainkan partai-partai oposisi terus melakukan hasutan-hasutan untuk mengacaukan masyarakat.

Pada akhirnya nyatalah bahwa PDRI dapat menerobos berbagai rintangan dan benar-benar posisinya sebagai ujung tombak dalam revolusi. Tentang keberhasilan PDRI itu pernah ditanyakan oleh BBC Seksi Indonesia pada tahun 1985 kepada Syafruddin Prawiranegara. Dengan jujur mantan ketua PDRI itu menjawab bahwa:

“Kami memimpin perjuangan dan mengkoordinir perjuangan di Sumatra dan Jawa. Di Jawa misalnya kami angkat Dewan Komisaris pemerintah Pusat. Dan kami mengadakan hubungan dengan luar negeri dan member data-data tentang keadaan perjuangan di dalam negerisupaya mereka bisa memperjuangkan nasib kita di Perserikatan bangsa-bangsa, dan di luar negeri, sebab di sana Mr. Maramis menjadi menteri Luar Negeri Pemerintah darurat. Dan perjuangan fisik, perjuangan tentara dilakukan di bawah panglima Besar Sudirman di Jawa, dan di Sumatra di bawah pimpinan Kepala territorial Sumatra yaitu Kolonel Hdayat” (Wild, 1986:202-203)

PDRI mempunyai kedudukan yang sangat penting karena ia hadir pada saat pemerintahan republik sedang kosong.

KESIMPULAN

Dengan kehadiran PDRI baik secara teritori maupun dalam praktik, maka asumsi colonial Belanda bahwa republic telah tiada, salah besar. Dibawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara PDRI mampu mempertahankan eksistensi RI, baik secara de facto maupun de jure. Selama periode keberadaannya, system pemerintahan yang dijalankan adalah pemerintahan gerilya. Pusat pemerintahan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain di daerah Sumatra Barat. Pusat pemerintahan identik dengan keberadaan ketua PDRI, dimana ketua PDRI berada disitulah pusat pemerintahan. Dalam bingkai sejarah Indonesia, periode kontemporer khususnya, PDRI telah dibuktikan mampu mempertahankan hak hidup dan hak merdeka suatu bangsa.

Ketika PDRI mengambil alih tampuk pemerintahan RI dengan dasar surat mandate presiden Sukarno, dan perintah rahasia secara lisan dari Hatta kepada Syafruddin Prawiranegara, system di atas tidak digunakan oleh Syafruddin Prawiranegara. System baru yang ditempuh adalah memadukan kekuatan sipil-militer untuk secara bersama-sama menjalankan pemerintahan republic. Dengan system ini maka PDRI memperoleh dukungan penuh dari jajaran TNI yang dipimpin Panglima Besar Jendral Sudirman. Hasil akhir dapat dilihat ternyata PDRI yang serba darurat

dan selalu bergerilya mampu mengkoordinir seluruh kekuatan republic dengan baik, sehingga usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia mengalami kegagalan besar.

Karena kemampuan mengendalikan pemerintahan, menjalin komunikasi, dan kemampuan bergerilya akhirnya PDRI mampu menerobos blockade Belanda ke luar negeri. Berbagai informasi dari Jawa mengalir ke pusat pemerintahan gerilya PDRI melalui sinyal pemancar radio gerilya. Dari pusat pemerintahan PDRI berbagai informasi tentang keadaan di Jawa, Sumatra dan daerah lain di Indonesia langsung dikirimkan ke perwakilan RI di New Delhi India. Dari India inilah informasi tentang Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia sehingga negara-negara di lima benua ini megutuk agresi militer Belanda dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Karena perlawanan gerilya yang terus menerus dari rakyat Indonesia serta kutukan dunia internasional yang terwakili dalam resolusi konferensi New delhi dan resolusi PBB, menyebabkan Belanda lumpuh luar dalam. Akhir petualangan Belanda di Indonesia ia harus angkat kaki dari bumi Indonesia. Karena keberhasilan diplomasi pada lingkup internasional itulah PDRI dapat dikatakan sebagai titik sambung antara RI dengan dunia internasional.

Daftar Rujukan

- Agung, Ida Anak Agung Gede. 1983. Renville. Jakarta: Sinar harapan.
- Alit, D. M. (2015). Peranan Masyarakat Dalam Perang Kemerdekaan: Studi Kasus Desa Marga Dalam Peristiwa Puputan Margarana 20 Nopember 1946. *Social Studies*, 3(1), 1-12.
- Amura, H. 1979. Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau (1945-1950). Jakarta: Antara.
- Armin, S.M. 1984. Kenang-kenangan dari Masa lampau. Jakarta: Pradnyaparamita.
- Atmakusumah (peny.). 1982. Tahta Untuk Rakyat. Jakarta: Gramedia.
- BPSIM. 1981. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau II. Jakarta: Tp.
- Chaniago, JR. 1989. Lintasan Sejarah PDRI. Jakarta: Arsip Nasional.
- Djamari, Saleh A. 1989. PDRI di Jawa. Jakarta: Arsip Nasional.
- Gottschalk, L. 1975. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press.
- Hatta, Moh. 1978. Memoir. Jakarta: Tinta Emas Indonesia.
- Kahin, G. Mct. 1963. The National and Revolution in Indonesia. Ithica : Cornell University Press.
- Kartodirjo, Sartono. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. Jakarta: Grammedia.
- Kementrian penerangan RI. 1953. Republik Indonesia Propinsi Sumatra tengah.
- Nasution, A.H. 1989. Memenuhi Panggilan Tugas. Jakarta: Haji Mas Agung.
- , 1980. Popkok-pokok Gerilya. Bandung: Angkasa.
- , 1966. Sejarah perjuangan Nasional Dibidang Bersenjata. Jakarta: Mega Book-stour.
- , 1979. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia IX. Bandung : Angkasa.
- Prawiranegara, Syafruddin. 1985. Sejarah Sebagai Pedoman pembangunan Masa Depan. Jakarta: Idayu.
- Rasyid, St. M. 1982. Sekitar PDRI. Jakarta: Bulan Bintang.
- Reid, Anthony.J.S. 1974. Indonesian National revolution. Victoria: Logman.
- Risalah No. 8 Th. XXVV, 1988 dan No. 9 Th. XXV, 1988.
- Rosidi, Ajip. 1986. Syafrudin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT. Jakarta : Idayu.
- Sastroamijoyo, Ali. 1974. Tonggak-tonggak di Perjalananku. Jakarta : Kinta.
- Simatupang, TB. 1980. Laporan dari Banaran. Jakarta: Sinar Harapan.
- Smit, C. 1986. Dekolonisasi Indonesia. Jakarta: Pustaka Azet.
- Soejono, H. 1989. Turun dari Gerilya 1949, Perang Kemerdekaan II. Jakarta: Arsip Nasional.
- Sudarsono, Yuwono. 1989. Segi-segi Luar Negeri PDRI. Jakarta: Arnas.
- Sukarno. 1965. Di Bawah bendera Revolusi. Jakarta: Tp.
- Taher, Ishaq dan Adli, Adrial. 1989. Aktivitas PDRI di Sumatra barat. Jakarta: Arsip nasional.

Velde, Van de JJ. 1987. Surat-surat dari Sumatra 1928-1948. Jakarta: Pustaka Azet.

Wild, Colin at.al. 1986. Gelora Api Revolusi. Jakarta: Gramedia.